

SEMIOTIKA SOSIAL SEBAGAI ALAT ANALISIS TEKS DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI KUALITATIF

Oleh Hasyim Ali Imran *

Abstract

This paper discusses the qualitative approach communication with research that is focused on the text as a subject of research. The writing is directed at a sample form of the application practice method in text analysis, that refers to a social semiotics method of MAK Halliday version. In academic, this writing is expected to contribute to ease students in doing practice.

Keywords: social semiotics, text analysis, kualitatif approach

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada teks sebagai subyek penelitian. Tulisan diarahkan pada contoh bentuk praktik penerapan metode analisis teks yang mengacu pada metode semiotika sosial versi MAK Halliday. Secara akademik tulisan ini diharapkan berkontribusi bagi kemudahan mahasiswa dalam mempraktikkannya.

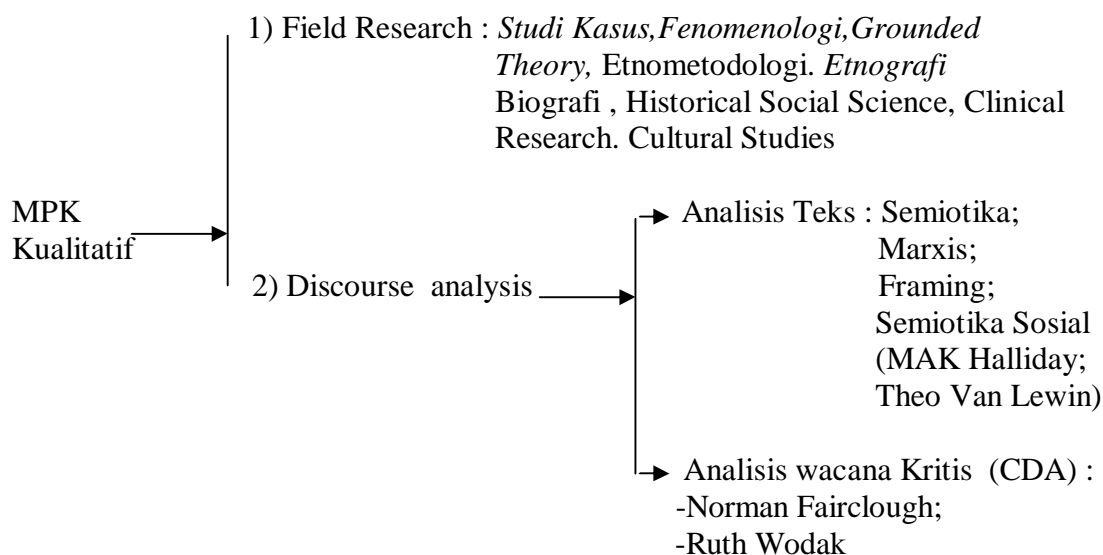
Kata kunci: semiotika sosial, analisis teks, pendekatan kualitatif.

1. Pendahuluan

Secara epistemologis, dalam penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif, diketahui sebenarnya memiliki banyak perangkat alat analisis, baik itu terhadap yang berbasiskan 'field' maupun pada riset yang berbasiskan "teks".

Secara terminologis, dari sejumlah metode penelitian kualitatif yang ada kini, sebenarnya itu telah terkelompokkan mana yang tergolong pada metode penelitian yang pas berbasiskan pada sumber 'field' dan mana metode penelitian yang

pas berbasiskan pada sumber teks. Untuk mengetahui ini, pertama dengan cara memahami pengelompokan metode penelitian komunikasi kualitatif. Berdasarkan catatan yang ada, maka pengelompokan dimaksud, wujudnya seperti sebagaimana tertera pada bagan berikut ini :



Secara epistemologis, dalam penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif, diketahui sebenarnya memiliki banyak perangkat alat analisis, baik itu terhadap yang berbasiskan *'field'* maupun pada riset yang berbasiskan "teks".

Dengan melihat bagan di atas, kini jelas mana metode penelitian yang relevan untuk diterapkan. Relevansi itu setidaknya terkait dengan lokus riset, yakni menyangkut *'field'* dan "teks". Dengan demikian, kekeliruan dini terkait pelaksanaan riset pendekatan kualitatif dapat dihindarkan. Tulisan ini sendiri berupaya menyajikan tulisan menyangkut salah satu bentuk praktik penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif yang berbasiskan pada "teks". Contoh bentuk praktik dimaksud, khususnya difokuskan pada analisis teks dengan metode semiotika sosial dalam versi MAK Halliday. Dengan pemaparan karya tulis dimaksud, secara akademis diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempermudah pelaksanaan riset-riset dengan pendekatan kualitatif yang berbasiskan teks.

2. Pembahasan

2.1. Semiotika Sosial M.A.K. Halliday

Menurut Hamad tujuan aplikasi Semiotika Sosial dengan menggunakan komponen Semiotika Sosial dari M.A.K. Halliday dan Ruqaiya Hassan dalam analisis isi media, adalah untuk menemukan hal terkait dengan tiga komponen Semiotika Sosial, yaitu: Medan Wacana (*field of discourse*); Pelibat Wacana (*tenor of discourse*); dan Sarana Wacana (*mode of discourse*).

Dari segi Medan Wacana (*field of discourse*) maka tujuannya untuk mengetahui apa yang dijadikan wacana media massa mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan. Diperlakukan apa sebuah obyek berita?

Terkait Pelibat Wacana (*tenor of discourse*), maka untuk mengetahui orang-orang yang dicantumkan dalam teks (seperti berita, editorial, dan lain-lain); sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka.

Sementara dari segi Sarana Wacana (*mode of discourse*), untuk mengetahui bagian yang diperankan oleh bahasa: bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip). Bagi keperluan praktis, kandungan tersebut memberikan implikasi

apa? (diantaranya yaitu berupa makna, citra, opini dan motif).¹

2.2. Praktik Semiotika Sosial M.A.K. Halliday, Sebuah Contoh Praktis

Untuk kepentingan tulisan ini, contoh teks yang diambil adalah Tajuk Rencana di *Harian Republika* tanggal 17 Mei 2006 dan 11 Mei 2006. Namun, contoh aplikasi analisis Semiotika Sosial Halliday di sini hanya disajikan berdasarkan contoh teks tajuk rencana *Harian Republika*, 11 Mei 2006 (terlampir), serta deskripsi analisisnya:

a. Hasil Analisis Teks

Hasil penelitian terhadap teks dalam Tajuk Rencana edisi 11 Mei 2006 disajikan dalam tabel berikut ini. Tajuk Rencana edisi 11 Mei 2006 sendiri memfiksasikan isu penyelesaian hukum kasus korupsi Pak Harto itu melalui tajuk berjudul "*Soeharto dan Fatsoen Pengampunan*". Temuan berdasarkan analisis semiotika sosial Halliday terhadap tajuk tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

¹ Hamad, Ibnu, (2007). Analisis Wacana (Discourse Analysis) Sebuah Pengenalan Awal, Jakarta, Diktat Perkuliahan Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, PPS MIK UPDM (B) Jakarta, hal. 15.

Tabel 1: Hasil analisa Tajuk Rencana Harian *Republika*, 11 Mei 2006

Kategori	Temuan	Keterangan
Medan Wacana (<i>field of discourse</i>)	-”Mungkin sebagian besar bangsa ini akan memilih memaafkan Soeharto atau bahkan menilainya tak bersalah. Yang dibutuhkan adalah landasan tata nilainya.”(p 11)	Pengampunan Soeharto berhubungan dengan dukungan tata nilai yang berkaitan dengan bagaimana sejarah membaca sepak terjang Pak Harto dimasa lalu, yang banyak jasanya bagi bangsa dan negara. Selain itu, Dukungan tata nilai erat kaitannya dengan peran pemerintah membentuk suatu tindakan politis dan hukum dalam kasus ini.
Pelibat Wacana (<i>tenor of discourse</i>)	1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 2. Soeharto, Mantan Presiden 3. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara, 4. Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet, 5. Jusuf Kalla, Wakil Presiden, 6. Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi, 7. Zaenal Ma’arif, Wakil Ketua DPR, 8. Muladi, Gubernur Lemhannas, dan 9. Pimpinan MPR.	Semua orang yang dicantumkan dalam teks adalah para petinggi dalam kepemimpinan institusi negara, legislatif eksekutif dan Yudikatif. Selain Sudi Silalahi, mereka semuanya menyatakan Kasus Soeharto ditutup saja dan perlu mendapat pengampunan karena jasanya yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Sarana Wacana (<i>mode of discourse</i>)	1. ”Parade pembesuk”(p. 2) 2. ”Kini, kata reformasi menjadi lelucon, dihindarkan, dan bau”(p.5). 3. ”Melalui pengaburan nilai, kita dibuat tolol.” ”..... Semua limbahnya dicekokkan ke mulut rakyat.”(p.6) 4. Ungkapan deskriptif dan eksplanasi mengenai keadaan reformasi sekarang pasca Soeharto dinyatakan dalam paragraf (p.4-11) 5. ”..... kita menganut asas <i>mikul duwur mendem jero</i> , atau ...” ; ” konglomerat hitam saja kita ampuni, masa Soeharto yang banyak jasanya kita tak mengampuni?”; ”..... apa bahasanya?”(p.10). 6. Pengampunan dilakukan berdasarkan justifikasi atas lemahnya penegakan hukum pada banyak kasus lainnya, ini diantaranya tersurat pada : “..tak ada penilep BLBI dan rekapitulasi yang masuk penjara, bahkan mereka bisa mengendalikan negeri ini)” (p.6); “Para konglomerat hitam sibuk berinvestasi dari satu negeri ke negeri lain.”(p7); “mengenal penjahat kemanusiaan	Melihat kata-katanya penuh dengan metafora yang menyindir seperti kata- kata ”parade pembesuk” dan ungkapan-ungkapan analogi yang keras (sarkastis) seperti <i>tolol</i> dan <i>dicekokkan</i> dari penulis,serta ungkapan euphimisme melalui jargon Orba <i>mikul duwur mendem jero</i> , menunjukkan suatu ketidak-senangan media atas tindakan pemerintah yang mengikuti arus pengampunan. Sebuah komparasi dihadirkan dalam badan tulisan yang diorientasikan pada tampaknya pencitraan situasi lemahnya bidang penegakan hukum, yang juga cenderung dijadikan bahan justifikasi bagi <i>pengampunan</i> , kemudian ditutup oleh paragraf yang mempertanyakan tindakan tersebut dengan mengajukan kata ”tata nilai”. Hal ini juga dapat diterjemahkan sebagai kepatutan hukum atau supremasi hukum dalam hal ini ditafsirkan sebagai proses hukum Soeharto.

	sebagai pahlawan..”(p9); “Konglomerat hitam saja diampuni, masa Soeharto yang berjasa banyak tidak diampuni?”(p.10).	
--	---	--

Sumber : Hasil Pengolahan data, 2008. Keterangan , p= paragraf

b. Deskriptif Analisis

- Medan Wacana (*field of discourse*)

Menyangkut temuan mengenai aspek medan wacana dalam semiotika sosial Halliday, maka wacana yang coba dikemukakan media adalah menyangkut *kejelasan tata nilai dalam penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto* dan bahwa mantan Presiden Soeharto adalah *dalang* dari ricuh reformasi bidang penegakan hukum saat ini. Terlihat dari judul “*Soeharto dan Fatsoen Pengampunan*” dan *lead* serta *ending*, bahwa ada pernyataan-pernyataan yang bersifat pesimis, sinis dan negatif terhadap wacana pengampunan mantan Presiden Soeharto yang diutarakan secara deskriptif dan tidak langsung. Artinya, pernyataan-pernyataan ini menjadi pengantar ke ide sebenarnya mengenai posisi media terhadap kasus Soeharto. Pada konteksnya tampak posisi media terhadap kasus Soeharto memang terbelah menjadi dua pendapat besar, tidak setuju pengampunan karena tidak ada dasar tata nilainya dan *setuju*.

Ketidaksetujuan *Republika* mengenai opininya itu digambarkan, antara lain, dengan teks sinis berupa: “Yang menarik, tak ada satu partai pun yang bersuara menentang arus pengampunan tersebut....”(p. 3 kalimat 4). Selain itu juga dengan cara mengajukan pertanyaan retorik bersifat sinis menyangkut tata nilai terhadap setiap contoh kasus lemahnya penegakan hukum, misalnya : “Maka tata nilai apakah yang hendak kita wariskan?”(p.7 kalimat 4; p.9 kalimat 5). Sedang opini media yang sifatnya *setuju*, ini digambarkan tidak seintens pada opininya yang tidak setuju tadi. Hal ini melainkan direpresentasikan dengan cara hati-hati dan tidak tegas. Ini tercermin dari tidak beraninya pihak media bahwa itu merupakan opininya sendiri. Dalam kaitan ini media menggambarannya dengan kata-kata “ *mungkin sebagian besar bangsa; memilih memaafkan ; dan menilainya tak bersalah* “dalam kalimat

“Mungkin sebagian besar bangsa ini akan memilih memaafkan Soeharto atau bahkan menilainya tak bersalah”. (p. 11 kalimat 1). Selain itu sikap kesetujuan media ini juga mengindikasikan kegamangan atau ketidakastian sikapnya mengenai wacana pengampunan itu sendiri. Ada kesan, kalimat dalam pragraf terakhir ini merupakan *keterpaksaan* yang sekedar ingin *aman* mengingat pemunculannya yang bersifat “ujug-ujug” yang tak *nyambung* sama sekali dengan opini media pada paragraf-paragraf sebelumnya yang sarat dengan kepesimisan dan kesinisan terhadap upaya penegakan hukum di negeri ini. Dari kesinisannya itu, sepertinya media ini berusaha juga menyerang dan menyudutkan sepak terjang pemerintah. Ini dapat dilihat bahwa wacana yang terbentuk juga wacana “pemerintah tidak becus menangani agenda reformasi” di bidang penegakan hukum.

- Pelibat Wacana (*tenor of discourse*)

Dari sisi pelibat wacana, disebutkan beberapa pejabat yang menjadi *background* bagi penjelasan selanjutnya. Tidak ada sumber yang dilibatkan dalam teks itu bukan berasal dari institusi negara. *Republika* juga menempatkan semua pihak yang pro terhadap *pengampunan* Pak Harto. Para pejabat yang dikemukakan yaitu: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet, Jusuf Kalla, Wakil Presiden, Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi, Zaenal Ma’arif, Wakil Ketua DPR, Muladi, Gubernur Lemhannas, dan Pimpinan MPR.

Dengan pencantuman para petinggi negara itu, para sumber yang tentunya strategis dalam memutuskan status hukum Pak Harto, yang nota bene semuanya setuju soal *pengampunan*, dengan demikian dapat diartikan bahwa *penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto* secara *de facto* memang sudah selesai, ditutup. Namun, dari segi penegakan

hukum, ini tetap bermakna *ketidakmampuan* pemerintah untuk menyelesaikan masalah Soeharto dalam hubungannya dengan masalah hukum dan ini dengan sendirinya menjadi sebuah kelemahan dan ketidakmampuan pemerintahan SBY. Dalam hal ini disebutkan secara jelas para menteri kabinet SBY dan dilanjutkan pada penjelasan betapa morat-maritnya orde reformasi ini dan ditutup oleh suatu tuntutan berupa pertanyaan tentang tata nilai termasuk dasar hukum yang intinya sebuah kejelasan, dalam hal ini wacana dan idenya adalah "kejelasan kasus Soeharto".

- Sarana Wacana (*mode of discourse*)

Dari sisi *mode wacana*, gaya bahasanya banyak mengandung metafor. Di sini metafor biasanya berusaha untuk memfokuskan suatu ide pada suatu kondisi. Dalam hal ini metafor yang dibentuk merupakan sindiran negatif ke arah pemerintah yang begitu lemah terhadap kasus Soeharto. Karenanya, beramai-ramai mengikuti "arus" pengampunan. *Republika* menggambarkan sindiran itu dengan kalimat, "Kini, kata reformasi menjadi lelucon, dihindarkan, dan bau"(p.5 kalimat 1). Atau, "..... kita menganut asas *mikul duwur mendem jero*, atau ..." ; (p.10 kalimat 2).

Selain itu, kesinisan atas "Pengampunan" dilakukan media berdasarkan justifikasi atas lemahnya penegakan hukum pada banyak kasus lainnya, ini diantaranya tersurat pada : "... tak ada penilep BLBI dan rekapitulasi yang masuk penjara, bahkan mereka bisa mengendalikan negeri ini)" (p.6); "Para konglomerat hitam sibuk berinvestasi dari satu negeri ke negeri lain."(p.7); "mengenal penjahat kemanusiaan sebagai pahlawan.."(p.9); "Konglomerat hitam saja diampuni, masa Soeharto yang berjasa banyak tidak diampuni?"(p.10).

c. Representasi Opini Media Terhadap Isu Penyelesaian Hukum Kasus Korupsi Pak Harto Melalui Tanda-Tanda yang Difiksasikan dalam Editorial

Seperti sudah disebutkan sebelumnya dalam bagian awal tulisan ini, bahwa persoalan kedua penelitian ini menyangkut "Bagaimana tanda-tanda tersebut merepresentasikan opini media terhadap isu penyelesaian hukum kasus dugaan

korupsi Pak Harto? Dengan pertanyaan tersebut dimaksudkan agar dapat diketahui representasi opini media terhadap isu penyelesaian hukum kasus korupsi Pak Harto berdasarkan konstruksinya melalui tanda-tanda yang ditampilkan dalam editorial. Upaya mengetahui ini sendiri dilakukan dengan cara menganalisis teks dalam editorial/ tajuk *Republika* dalam edisi 11 dan 17 Mei 2006.

Berdasarkan temuan berdasarkan analisis semiotika siosial Halliday menyangkut editorial edisi 11 Mei 2006, berkaitan dengan aspek medan wacana maka wacana yang coba dikemukakan media adalah menyangkut *kejelasan tata nilai dalam penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto* dan bahwa mantan Presiden Soeharto adalah *dalang* dari ricuh reformasi bidang penegakan hukum saat ini. Sehubungan pewartawannya itu kerap dimediasikan melalui penggunaan tanda-tanda yang merepresentasikan sifat pesimis, sinis dan negatif terhadap wacana pengampunan mantan Presiden Soeharto yang diutarakan secara deskriptif dan tidak langsung maka berdasarkan analisis dapat diinterpretasikan bahwa itu *merepresentasikan opini media yang sebenarnya tidak setuju* atas "pengampunan" karena tidak memiliki landasan tata nilai.

Berkaitan dengan komponen Pelibat Wacana dalam konteks semiotika sosial, dengan mana media berdasarkan pewartawannya secara berlawanan arus mempertanyakan *tata nilai* yang pada intinya sebuah kejelasan atas "pengampunan" Soeharto sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang disuarakan oleh semua pelibat yang nota bene terdiri dari para menteri kabinet SBY, kiranya ini merepresentasikan opini media bahwa mereka sebenarnya *tidak setuju* terhadap "pengampunan" itu sendiri.

Kemudian menyangkut sisi Sarana Wacana atau mode wacana, dengan gaya bahasa yang digunakan media banyak mengandung metaforis, sarkastis seumpama "mengenal penjahat kemanusiaan sebagai pahlawan.", "tak ada penilep BLBI masuk penjara" dan sinis seperti "*mikul duwur mendem jero*" dan reformasi menjadi lelucon dan bau" yang dibentuk guna penyindiran negatif ke arah pemerintah yang begitu lemah terhadap banyak kasus penegakan hukum termasuk kasus Pak Soeharto, secara semiotik ini menandakan bahwa media pada dasarnya beropini *tidak setuju* atas kebijakan "pengampunan" Pak Harto itu.

Selanjutnya, terkait temuan tajuk edisi 17 Mei 2006 menyangkut komponen medan wacana, maka di sini tajuk ingin menempatkan wacana Soeharto dalam suatu kerangka tentang penyelesaian kasus secara hukum. Dengan *warning* berupa akan terjadinya pengambilalihan proses hukum oleh hakim jalanan jika jalur penyelesaiannya bukan berdasarkan tata nilai hukum yang ada, pemediaan pesan dalam editorial ini tampak lebih mengarah pada upaya merepresentasikan makna opininya yang *setuju* mengenai penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi Pak Harto harus ditempuh *melalui jalur hukum*. Dengan kata lain, media beropini bahwa Pak Harto harus diadili melalui jalur hukum pidana.

Dari kategori pelibat wacana, sehubungan dengan temuannya yang menunjukkan bahwa penyertaan pihak tertentu dalam tulisan ini mengarah pada makna tentang bagaimana kasus Soeharto itu untuk dilanjutkan dan dituntaskan dalam kerangka hukum, kiranya ini dapat ditafsirkan sebagai upaya media merepresentasikan opininya dalam memandang persoalan penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi Pak Harto. Opini media sendiri cenderung direpresentasikan dalam bentuk *setuju*.

Mengenai aspek sarana atau mode wacananya, maka dengan penggunaan gaya kebahasaan yang hiperbolis, euphimisme, sarkastis dan metaforis yang lebih merupakan sindiran-sindiran kepada pihak pemerintah dan kubu Soeharto tentang wacana dihentikannya kasus soeharto melalui penerbitan SKPP, media berupaya merepresentasikan makna bahwa Pak Soeharto terkait “pengampunanya”, adalah sebagai sesuatu yang negatif dan bertentangan dengan hukum dan idealisme mereka/media (idealisme reformasi). Dengan makna yang demikian maka secara semiotis ini menandakan bahwa media, meskipun tampak berusaha mengambil *posisi aman* dalam pengungkapannya karena tidak berani mengklaim dirinya secara langsung dengan menggunakan kata “kami” melainkan justru kerap memakai kata ganti orang pertama jamak seperti “kita”, namun pada dasarnya *pendapat* mereka sangat setuju terhadap penyelesaian kasus dugaan korupsi Pak Harto itu harus ditempuh melalui jalur hukum.

d. Pembahasan Kasus

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini, bahwa tujuan penelitian melalui dua permasalahan yang diangkatnya, yaitu

berupaya untuk mengetahui konstruksi media melalui tampilan tanda-tanda dalam editorialnya mengenai isu penyelesaian hukum kasus korupsi Pak Harto dan mengetahui representasi opini media terhadap isu penyelesaian hukum kasus korupsi Pak Harto berdasarkan konstruksinya melalui tanda-tanda yang ditampilkan dalam editorial. Guna kepentingan tersebut penelitian ini menjadikan editorial/tajuk Republika edisi 11 Mei dan 17 Mei 2006 sebagai sumber datanya.

Sejalan dengan temuan penelitian, maka berdasarkan analisis semiotika sosial Halliday menyangkut editorial edisi 11 Mei 2006, berkaitan dengan aspek Medan Wacana maka wacana yang coba dikonstruksikan media mengenai adalah menyangkut *kejelasan tata nilai* dalam penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto. Pemediannya sendiri kerap melalui penggunaan tanda-tanda yang merepresentasikan sifat pesimis, sinis dan negatif terhadap wacana pengampunan mantan Presiden Soeharto yang diutarakan secara deskriptif dan tidak langsung. Berkaitan dengan komponen Pelibat Wacana dalam konteks semiotika sosial, dengan mana media berdasarkan pewacanaannya secara *berlawanan arus* mempertanyakan *tata nilai* yang pada intinya mengarahkan makna adanya sebuah kejelasan atas “pengampunan” Soeharto sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang disuarakan oleh semua pelibat yang berasal dari kalangan eksekutif kabinet SBY. Sementara terkait komponen sarana wacana, maka dengan gaya bahasa yang digunakan media banyak yang mengandung metaforis, sarkastis dan sinis ini bertendensi agar lahirnya makna penyindiran negatif ke arah pemerintah yang begitu lemah terhadap banyak kasus penegakan hukum termasuk kasus Pak Soeharto.

Dengan pengetahuan mengenai konstruksi media melalui tampilan tanda-tanda yang dipilihnya dalam teks editorial mengenai isu penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi Pak Harto berdasarkan hasil analisis melalui tiga komponen semiotik dalam semiotika sosial Halliday itu, maka dapat dimaknai bahwa dalam kasus dimaksud media terlihat merepresentasikan opininya yang *tidak setuju* terhadap kebijakan pemerintah yang “mengampuni” Pak Harto dalam kaitan penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukannya selama berkuasa.

Seminggu setelah Republika mewacanakan penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto melalui editorialnya tadi, maka terkait dengan banyaknya protes yang

muncul terhadap “pengampunan” Pak Harto, harian ini kembali mengangkatnya melalui rubrik yang sama pada edisi 17 Mei 2006. Jika pada edisi sebelumnya harian ini mewacanakan tata nilai, maka pada edisi 17 Mei pun kembali soal *tata nilai* itu mendapat penekanan dalam konstruksinya mengenai realitas “proses hukum” Pak Harto.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tajuk Rencana edisi 17 Mei 2006 itu, maka menyangkut komponen *Medan Wacana*, di sini tajuk ingin menempatkan wacana Soeharto dalam suatu kerangka tentang penyelesaian kasus secara hukum. Bahkan wacananya itu menempatkan tanda-tanda yang bermakna begitu seriusnya unsur “proses hukum” itu melalui *warning* berupa akan terjadinya *pengambilalihan proses hukum oleh hakim jalanan* jika jalur penyelesaiannya bukan berdasarkan tata nilai hukum yang ada. Terkait dengan komponen Pelibat Wacana, sehubungan dengan temuan yang menunjukkan media melibatkan pihak tertentu yang anti terhadap “pengampunan” dan menjadikannya sebagai acuan untuk mengakhiri pewacanaan dalam menelaah “pengampunan” dalam tulisan, ini mengarah pada makna tentang bagaimana kasus Soeharto itu untuk dilanjutkan dan dituntaskan dalam kerangka hukum. Sementara dari segi Sarana atau Mode Wacananya, maka dengan penggunaan gaya kebahasaan yang hiperbolis, euphimisme, sarkastis dan metaforis yang lebih merupakan sindiran terhadap “kebijakan pengampunan”, ini menandakan bahwa media berupaya merepresentasikan makna bahwa kebijakan “pengampunan, merupakan hal negatif dan bertentangan dengan hukum dan idealisme (idealisme reformasi) mereka/media.

Berdasarkan pengetahuan mengenai konstruksi media melalui tampilan tanda-tanda yang dipilihnya dalam teks editorial 17 Mei 2006 mengenai isu penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi Pak Harto yang ditemukan berdasarkan hasil analisis melalui tiga komponen semiotik dalam semiotika sosial Halliday itu, dengan mana menunjukkan makna bahwa media pada dasarnya menginginkan terlaksananya proses hukum pidana dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto, maka hal ini dapat dimaknai bahwa media telah merepresentasikan *opinionnya* yang berupa ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang “mengampuni” Pak Harto.

Menyimak temuan dan analisis mengenai dua teks dalam editorial sebelumnya, maka Harian Republika dalam mengkonstruksi realitas

penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi Pak Harto mengindikasikan adanya konsistensi dalam upaya mereka mengarahkan makna yang mereka inginkan, yakni dengan alasan *dasar* tata nilai, kebijakan “pengampunan” berlawanan dengan hukum dan idealisme mereka/media (idealisme reformasi) dan karenanya mantan Presiden Soeharto harus diadili sesuai dengan tata nilai hukum yang ada demi tegaknya hukum dan terlunaskannya rasa keadilan masyarakat. Pengarahan makna yang demikian, meskipun dalam fiksasi wacananya kerap menggunakan simbol kata ganti orang pertama jamak “kita” yang bermakna mencakup pihak di luar media semisal individu khalayak yang membacanya, dan bukan “kami” yang bermakna lebih *berani dan bertanggung jawab* karena langsung menunjuk pihak media itu sendiri sebagai produsen makna lewat bahasa, namun secara semiotik kiranya itu tetap menyimbolkan bahwa pada hakikatnya media ini secara konsisten berpendapat *tidak setuju* terhadap keluarnya kebijakan pemerintah yang mengampuni Pak Harto dan lebih setuju ditempuh lewat proses jalur hukum. Dengan representasi opini media yang demikian, maka jika dikatakan bahwa opini atau pendapat itu merupakan ekspresi tersembunyi dari sikap, itu berarti opini media tadi sekaligus dapat menjadi representasi sikap mereka dalam memandang isu penyelesaian hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Pak Harto.

3. Penutup

Dari hasil pemaparan sebelumnya diketahui bahwa penelitian komunikasi dengan pendekatan kualitatif memiliki variasi dalam hal metode. Namun varian metode dimaksud, secara sederhana, setidaknya menurut versi sumber data (subyek penelitian), varian tadi terkelompokkan pada dua domain, pertama pada metode yang pas berbasiskan pada “field” dan kedua berbasiskan pada “teks”. Salah satu metode yang berbasiskan pada teks itu adalah metode analisis teks Semiotika Sosial versi MAK Halliday. Dari praktik analisis teks berbasiskan versi MAK Halliday tersebut diketahui bahwa analisis teks ini pada dasarnya berupaya menemukan unsur-unsur Medan Wacana (*field of discourse*); Pelibat Wacana (*tenor of discourse*); dan Sarana Wacana (*mode of discourse*).

REFERENSI

- Assegaf, Djafar. 1983. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bhikkhu Jotidhammo, M.Hum. 2006. “Korupsi Merupakan Perbuatan Yang Tidak Terpuji Dalam Ajaran Sang Buddha”, dalam *Menuju Masyarakat Anti Korupsi, Perspektif Agama Buddha*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Onong Uchyana. 2000. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, PT.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Eriyanto. 2000. *Metoda Polling*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halliday., M.A.K. dan Ruqaiya Hasan. 1994. *Bahasa, Konteks, dan Teks, Aspek-Aspek bahasan dalam Pandangan Semiotik Sosial*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Hamad, Ibnu. 2007. *Analisis Wacana (Discourse Analisis) Sebuah Pengenalan Awal*. Jakarta: Diktat Per-kuliahamn Methode Penelitian Komunikasi Kulaitatif, PPS MIK UPDM (B) Jakarta.
- Kuntoro, Suharso Bayu, S.Ag. 2006. ”Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Hindu”, dalam *Menuju Masyarakat Anti Korupsi, Perspektif Agama Hindu*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Lippman, Walter. *Public Opinion* (Diterjemahkan oleh S. Maimoen). Jakarta: Yayasan Obor.
- Moelong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Sebuah Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur. Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Sunarjo, Djoenasih, S. 1984. *Opini Publik*. Yogyakarta: Liberty.
- W.S. Januardi, SE. 2006. “Korupsi dalam pandangan Khonghucu”, dalam *Menuju Masyarakat Anti Korupsi, Perspektif Agama Khonghucu*. Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika, hal. 187.

Sumber Lain:

- <http://allword.com>.
- <http://www.answers.com/topic/opinion?cat=biz-fin>
- <http://www.ilstu.edu/~jrbaldw/372/Representation.ht>
- <http://www.thefreedictionary.com/opinion>
- <http://www.mediaknowall.com/representation.html>
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/representation>
- http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
- <http://www.yourdictionary.com/meaning>
- <http://www.wikipedia.com>.
- <http://www.wordreference.com/definition/pictorial>

Juliastuti, Nuraini. 2000. "Representasi", dalam, <http://www.kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm>

Klitgaard, Robert & Ronald Maclean, Penuntun Pemberantasan Korupsi, dikutip Betty Rosalina dalam <http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d=materi&do=view&id=240>.

Media Literacy; <http://wneo.org/media/glossary.htm>

Merriam-websteronlinedictionary, (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/corrupts> Namibia's Zero Tolerance for Corruption Campaign, dalam <http://www.anticorruption.info/corrddef.htm/>.

Rosalina, Betty,"Korupsi dalam Perspektif Sosio-Kultural", dalam <http://www.kammi.or.id/last/lihat.php?d=materi&do=view&id=240>.

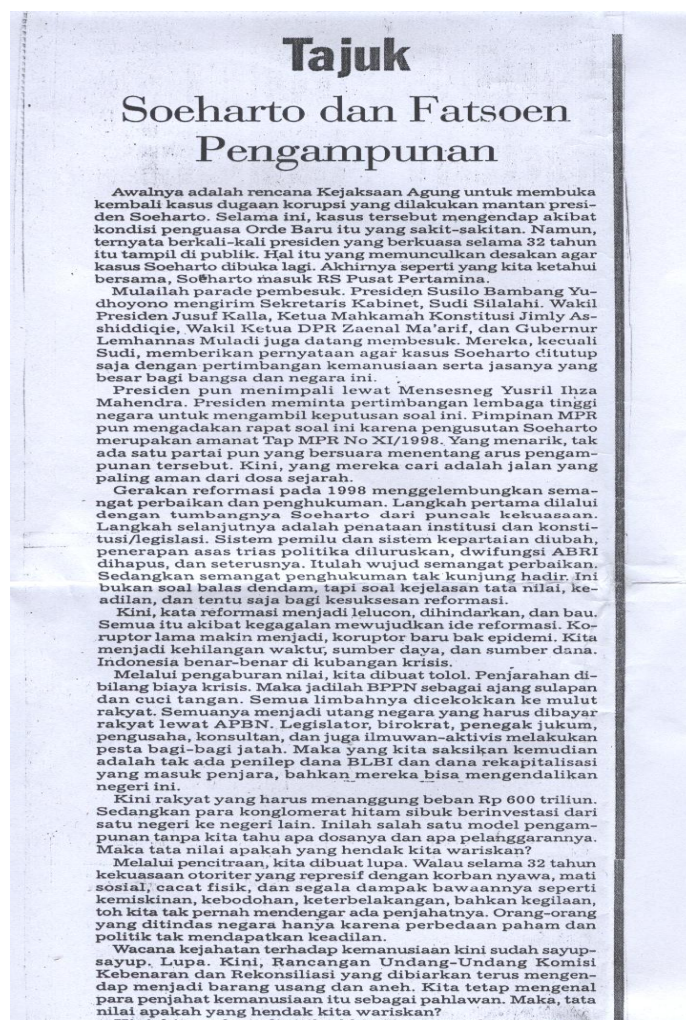
SinlaEloE, Paul dalam <http://groups.yahoo.com/group/indonesia-studies>

Thamrin, Muhammad Husni, dalam <http://thamrin.wordpress.com/2006/07/18/definisi-korupsi/>

Thamrin, Muhammad Husni, dalam <http://209.85.175.104/search?q=cache:YFUQ0MxLdGoJ:thamrin.blogspot.com/2006/05/indonesia-and-corruption>.

The 'Lectric Law Library, dalam <http://www.lectlaw.com/def/c314.htm>.

Transparency Internasional (TI) Indonesia, dalam <http://www.ti.or.id/polling/9/>



*Hasyim Ali Imran

Peneliti Madya Bidang Studi komunikasi dan media di BPPKI Balitbang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Email : halimhts@yahoo.com